



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK,
DJSN DAN BNP2TKI)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 26 Juni 2013
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Acara	: Audiensi
Ketua Rapat	: dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra.Tri Udiartiningrum/Kabag Set Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1 Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir Anggota	: A. orang dari 48 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dibuka pukul 14.35 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 254 ayat (1), rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia menyampaikan paparan antara lain :

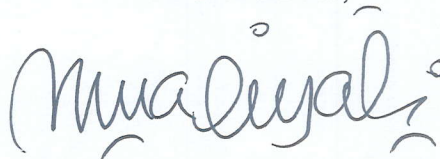
- a. Sejarah kefarmasian termasuk pertanggungjawaban penggunaan obat serta sejarah keberadaan apoteker Indonesia.
 - b. Pemosisian apoteker oleh pemerintah, terkait bunyi dari UU No, 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa apoteker sebagai tenaga kesehatan.
 - c. Praktek kefarmasian, yaitu hadirnya apoteker sebagai *liable person* pada setiap aktivitas yang melibatkan obat.
 - d. Kendala dan permasalahan profesi Apoteker di lapangan.
 - e. Misi, visi, dan tugas pokok Ikatan Apoteker Indonesia.
 - f. Reformasi pelayanan kesehatan.
2. Sistem pelayanan kesehatan terkesan masih terputus terkait ketidakjelasan peran dari apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Perlu kejelasan peran apoteker sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional.
 3. Perlu upaya penyadaran kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memahami bila obat dan dosis yang diberikan kepada pasien tidak sesuai peruntukannya untuk proses menyembuhkan penyakit.

III. KESIMPULAN

Komisi IX DPR RI mengapresiasi masukan dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan akan dipergunakan sebagai bahan atau materi acuan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Badan POM RI serta rapat-rapat Panja BPJS Komisi IX DPR RI.

Rapat diakhiri pukul 17.05 WIB.

KETUA RAPAT,



dr. NOVA RIYANTI YUSUF, SpKJ